

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2.1 Otonomi Daerah

Otonomi secara etimologi berasal dari kata *auto* dan *nomos* (*autonomos*) atau *autonomia* (yunani) yang berarti sendiri dan peraturan atau pemerintah. Merujuk pada dua perkataan tersebut, maka secara sederhana otonomi dapat diartikan sebagai “peraturan yang dibuat oleh satu entitas (pemerintah) sendiri.” (Leo Agustino, 2014:13). Otonom atau berotonomi berarti mempunyai “peraturan sendiri” atau mempunyai hak / kekuasaan / kewenangan untuk membuat peraturan sendiri (sering kali juga disebut hak / kekuasaan / kewenangan pengaturan atau legislatif sendiri). Kemudian arti istilah otonomi ini berkembang menjadi “pemerintahan sendiri”. Pemerintahan sendiri ini meliputi pengaturan atau perundang-undangan sendiri, pelaksanaan sendiri, dan dalam batas-batas tertentu juga pengadilan dan kepolisian sendiri. Dengan demikian daerah otonom adalah daerah yang berhak dan berkewajiban untuk mengatur mengurus rumah tangganya sendiri. (Josef Riwu Kaho, 2010 : 16).

Menurut M. Busrizalti (2013 : 61). Otonomi adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan negara kesatuan Republik Indonesia.

Sedangkan menurut Haw Widjaja, (2007 :17) Otonomi adalah penyerahan urusan pemerintah kepada pemerintah daerah yang bersifat operasional dalam

rangka sistem birokrasi pemerintahan. Tujuan otonomi adalah mencapai efektifitas dan efesiensi dalam pelayanan kepada masyarakat. Tujuan yang hendak dicapai dalam penyerahan tugas ini antara lain menumbuhkembangkan daerah dalam berbagai bidang, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, menumbuhkan kemandirian daerah, dan meningkatkan daya saing daerah dalam proses pertumbuhan.

Perjalanan otonomi di indonesia sudah dimulai sejak 1945 dan peraturan perundang-undangan pertama yang mengatur pemerintahan daerah pasca proklamasi kemerdekaan adalah UU No. 1 Tahun 1945. (Nanang Nugraha, 2013:3)

Dengan otonomi daerah dapat di pandang sebagai cara untuk mewujudkan secara nyata penyelenggaraan pemerintah yang efektif, efisien dan berwibawa guna mewujudkan pemberian pelayanan kepada masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan otonomi daerah juga merupakan keterikatan yang kuat antara daerah yang satu dengan yang lainnya, disamping menumbuhkembangkan semangat kebersamaan dalam simpul Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Haw Widjaja, 2003 :32)

Dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan di dalam pasal 18, pasal 18A, dan pasal 18B mengenai pemerintah daerah, yaitu:

Pasal 18

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintah daerah, yang diatur dengan Undang-undang;
- (2) Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut azas otonomi dan tugas pembantuan;
- (3) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum;
- (4) Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis;
- (5) Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah;
- (6) Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lainnya untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan;
- (7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintah daerah diatur dalam undang-undang.

Pasal 18 A

- (1) Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, kota atau provinsi, dan kabupaten dan kota, diatur

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keanekaragaman daerah;

- (2) Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumberdaya alam dan sumberdaya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.

Pasal 18 B

- (1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang;
- (2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang di atur dalam undang-undang.

2.1.1 Pemekaran Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 78 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah, Pemekaran Daerah merupakan pemecahan Provinsi atau Kabupaten/kota menjadi dua daerah atau lebih. Dalam hal pemekaran ini dapat berupa pembentukan daerah yaitu pemberian status pada wilayah tertentu sebagai daerah provinsi atau daerah Kabupaten/kota. Penghapusan daerah yaitu pencabutan status sebagai daerah Provinsi atau daerah Kabupaten/kota dan penggabungan daerah yang merupakan penyatuan daerah yang dihapus ke dalam daerah lain yang bersandingan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemekaran daerah sebagai proses pembagian wilayah menjadi lebih dari satu wilayah merupakan semacam fenomena yang terus berkembang di Indonesia, baik itu pemekaran Provinsi, maupun pemekaran Kabupaten/kota, (H.R Makagansa, 2008 : 35), pasca tahun 1999 sampai sekarang, tercatat pertambahan jumlah Kabupaten/kota di Indonesia sudah bertambah dengan 524 daerah mekaran, yang terdiri dari 33 provinsi 398 kabupaten, 93 Kota. Hal ini berkaitan dengan dampak positif era reformasi, dimana setiap daerah dituntut untuk memajukan daerahnya sendiri dengan melihat potensi yang ada pada daerah tersebut.

Berbicara tentang pemekaran daerah tidak terlepas dari teori desentralisasi, sebagai wujud dari tuntutan akan penerapan prinsip-prinsip demokrasi dalam kehidupan bernegara.

2.1.2 Mekanisme Pemekaran Daerah

Dalam pembentukan daerah dalam Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 dijelaskan pada pasal 4 yakni :

- 1) Pembentukan daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang antara lain mencakup nama, cakupan wilayah, batas, ibukota, kewenangan menyelenggarakan urusan pemerintahan, penunjukan pejabat kepala daerah, pengisian keanggotaan DPRD, pengalihan kepegawaian, pendanaan, peralatan, dan dokumen, serta perangkat daerah;
- 2) Pembentukan daerah dapat berupa penggabungan beberapa daerah atau bagian daerah yang bersandingan atau pemekaran dari satu daerah menjadi dua daerah atau lebih;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

- 3) Pemekaran dari satu daerah menjadi 2 (dua) daerah atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan setelah mencapai batas minimal usia penyelenggaraan pemerintahan.

Selanjutnya untuk membentuk suatu daerah otonom yaitu berdasarkan pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Pembentukan daerah harus memenuhi syarat administratif, teknis, dan fisik kewilayahan yakni:

- 1) Syarat administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk provinsi meliputi adanya persetujuan DPRD kabupaten/kota dan Bupati/Walikota yang akan menjadi cakupan wilayah provinsi, persetujuan DPRD provinsi induk dan Gubernur, serta rekomendasi Menteri Dalam Negeri.
- 2) Syarat administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kabupaten/kota meliputi adanya persetujuan DPRD kabupaten/kota dan bupati/wali kota yang bersangkutan, persetujuan DPRD provinsi dan gubernur serta rekomendasi Menteri Dalam Negeri.
- 3) Syarat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi faktor yang menjadi dasar pembentukan daerah yang mencakup faktor kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, kependudukan, luas daerah, pertahanan, keamanan, dan faktor lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah.
- 4) Syarat fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi paling sedikit 5 (lima) kabupaten/kota untuk pembentukan provinsi dan paling sedikit 5 (lima) kecamatan untuk pembentukan kabupaten, dan 4 (empat) kecamatan untuk pembentukan kota, lokasi calon ibukota, sarana, dan prasarana

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemerintahan.

Pemekaran Daerah dilakukan melalui tahapan Daerah Persiapan provinsi atau Daerah Persiapan kabupaten/kota, Adapun tata cara pembentukan daerah Kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam PP No. 78 Tahun 2007 Pasal 16 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah adalah sebagai berikut:

1. Aspirasi sebagian besar masyarakat setempat dalam bentuk Keputusan BPD untuk Desa dan Forum Komunikasi Kelurahan atau nama lain untuk Kelurahan diwilayah yang menjadi calon cakupan wilayah Kabupaten/kota yang akan dimekarkan;
2. DPRD Kabupaten/kota dapat memutuskan untuk menyetujui atau menolak aspirasi tersebut dalam bentuk Keputusan DPRD berdasarkan aspirasi sebagian besar masyarakat setempat yang diwakili oleh BPD untuk desa atau nama lain dan Forum Komunikasi Kelurahan untuk kelurahan atau nama lain;
3. Bupati/Walikota memutuskan untuk menyetujui atau menolak aspirasi dalam bentuk Keputusan Bupati/Walikota berdasarkan hasil kajian daerah;
4. Bupati/Walikota mengusulkan pembentukan kabupaten/kota kepada Gubernur untuk mendapatkan persetujuan dengan melampirkan:
 - a. Dokumen aspirasi masyarakat calon Kabupaten/kota;
 - b. Hasil kajian daerah;
 - c. Peta wilayah calon Kabupaten/kota; dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Keputusan DPRD Kabupaten/kota dan Keputusan Bupati/Walikota (syarat administratif).
5. Gubernur memutuskan untuk menyetujui atau menolak usulan pembentukan Kabupaten/kota berdasarkan evaluasi terhadap kajian daerah;
6. Gubernur menyampaikan usulan pembentukan calon Kabupaten/kota kepada DPRD Provinsi;
8. DPRD memutuskan untuk menyetujui atau menolak usulan pembentukan Kabupaten/kota; dan
9. Dalam hal Gubernur menyetujui usulan pembentukan Kabupaten/kota, Gubernur mengusulkan pembentukan Kabupaten/kota kepada Presiden melalui Menteri dengan melampirkan:
 - a. Dokumen aspirasi masyarakat di calon Kabupaten/kota;
 - b. Hasil kajian daerah;
 - c. Peta wilayah calon Kabupaten/kota;
 - d. Keputusan DPRD Kabupaten/kota dan keputusan Bupati/Walikota (syarat administratif); dan
 - e. Keputusan DPRD Provinsi dan Keputusan Gubernur (syarat administratif).

Menteri membentuk Suatu tim untuk melakukan penelitian terhadap usulan pembentukan Kabupaten, kemudian berdasarkan hasil penelitian, Menteri menyampaikan rekomendasi usulan pembentukan daerah kepada DPOD (Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah). Berdasarkan rekomendasi usulan pembentukan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

daerah, Menteri meminta tanggapan tertulis para Anggota DPOD pada sidang DPOD. Dalam hal DPOD memandang perlu dilakukan klarifikasi dan penelitian kembali terhadap usulan pembentukan daerah, DPOD menugaskan Tim Teknis DPOD untuk melakukan klarifikasi dan penelitian. Berdasarkan hasil klarifikasi dan penelitian tersebut, DPOD bersidang untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada Presiden mengenai usulan pembentukan daerah.

Selanjutnya Menteri menyampaikan usulan pembentukan suatu daerah Kepada Presiden berdasarkan saran dan pertimbangan DPOD. Dalam hal Presiden menyetujui usulan pembentukan daerah, Menteri menyiapkan Rancangan Undang-undang (RUU) tentang pembentukan daerah. Setelah Undang-undang pembentukan daerah diundangkan, Pemerintah melaksanakan peresmian daerah dan melantik pejabat kepala daerah. Peresmian daerah tersebut dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak dilaksanakannya Undang-undang tentang pembentukan daerah.

Pemerintah melakukan pembinaan melalui fasilitas terhadap daerah otonom baru sejak peresmian daerah dan pelantikan pejabat kepala daerah berupa:

- a. Penyusunan perangkat daerah;
- b. Pengisian personil;
- c. Pengisian keanggotaan DPRD;
- d. Penyusunan APBD;
- e. Pemberian hibah dari daerah induk dan pemberian bantuan dari provinsi;
- f. Pemindahan personil, pengalihan asset, pembiayaan dan dokumen;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- g. Penyusunan rencana umum tata ruang daerah;
- h. Dukungan bantuan teknis infrastruktur penguatan investasi daerah.

Pemberian fasilitas tersebut pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f dilaksanakan 3 tahun berturut-turut sejak peresmian dilaksanakan oleh Gubernur bersama Bupati kabupaten induk. Kemudian pada huruf g dan huruf h dilaksanakan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-departemen secara bertahap dan terpadu. Adapun dana yang diperlukan dalam rangka pembentukan Kabupaten/kota dibebankan pada APBD Kabupaten/kota induk dan APBD Provinsi.

2.1.3. Wujud Otonomi Daerah

Hadirnya otonomi kini daerah-daerah mulai tercambuk untuk berombak memacu kemajuan sesuai potensi, kondisi, dan strategi masing-masing. Buah dari keterpacuan dan keleluasaan untuk berkembang itupun sekarang sudah mulai dapat dirasakan. Ada indikasi-indikasi yang sangat positif setelah dilaksanakannya otonomi daerah. Pada tingkat regional ekonomi bertumbuh cukup signifikan di beberapa daerah, diwarnai dengan kemakmuran masyarakat yang meningkat, seiring bergeraknya sirkulasi uang dari pusat ke daerah. Faktor penunjangnya antara lain kemudahan investasi yang dapat dilakukan langsung ke daerah, tidak lagi melalui kerumitan birokrasi dari pusat. Sebagai dampak dari pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah pusat mendelegasikan beberapa wewenang yang semula menjadi kewenangan pemerintah pusat menjadi kewenangan daerah. Ini bertujuan untuk memperlancar tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan sehingga diadakan pembagian kewenangan

Hak Cipta Ditanggung Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepala daerah. Dalam pembagian wewenang tidak seluruh wewenang pusat dilimpahkan ke daerah, masih ada wewenang tertentu yang dipegang oleh pemerintah pusat. Dengan kebijakan otonomi, maka beban para pejabat penyelenggaraan di pusat menjadi kecil dalam konteks jumlahnya, namun besar dalam konteks bobotnya. (M. Busrizalti, 2013: 155-156)

Adanya kewenangan urusan pemerintahan yang begitu luas yang diberikan kepada daerah dalam rangka otonomi daerah, pada suatu sisi dapat merupakan berkat, namun harus berfikir dan berusaha keras agar urusan-urusan pemerintahan yang menjadi urusan rumah tangga daerah itu dapat dilaksanakan secara baik. (M. Busrizalti, 2013:150)

Dalam rangka otonomi daerah dimana kewenangan cenderung dimiliki oleh kabupaten/kota, harapan dan tuntutan masyarakat tentang keadilan dalam penyelenggaraan kehidupan dibidang ekonomi, politik, sosial budaya, penegakan hukum dan penghargaan atas hak asasi manusia tidak bisa ditawar-tawar. Dalam rangka menampung aspirasi masyarakat, maka otonomi daerah merupakan salah satu upaya yang strategis yang memerlukan pemikiran yang matang, medasar dan berdimensi jauh ke depan. Pemikiran itu kemudian dirumuskan dalam kebijakan otonomi daerah yang sifatnya menyeluruh dan dilandasi prinsip-prinsip dasar demokrasi, kesetaraan dan keadilan disertai oleh kesadaran akan keanekaragaman / kemajemukan.

Pada dasarnya kebijakan ekonomi daerah diarahkan pada :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Peningkatan pelayanan publik (masyarakat) dan pengembangan kreativitas masyarakat serta aparatur pemerintah daerah;
2. Kesetaraan hubungan antara pusat dan pemerintah daerah dalam kewenangan dan keuangan;
3. Menjamin peningkatan rasa kebangsaan, demokrasi, dan kesejahteraan masyarakat di daerah;
4. Menciptakan ruang yang lebih luas bagi kemandirian daerah.

Untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah diperlukan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab di daerah secara proposional dan berkeadilan, jauh dari praktek-praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme serta adanya perimbangan antara keuangan pemerintah pusat dan daerah.

Melalui otonomi diharapkan daerah akan lebih mandiri dalam menentukan seluruh kegiatannya dan pemerintah pusat diharapkan tidak terlalu aktif mengatur daerah. Pemerintah daerah diharap mampu memainkan peranannya dalam membuka peluang memajukan daerah dengan melakukan identifikasi potensi sumber-sumber pendapatannya dan mampu menetapkan belanja daerah secara ekonomi wajar, efisien dan efektif, termasuk perangkat daerah meningkatkan kinerja, mempertanggung jawabkan kepada pemerintah atasannya maupun kepada publik. (Haw Widjaja, 2002 : 99-101)

2.1.4. Hubungan Pemekaran Wilayah Dengan Otonomi Daerah

Pada dasarnya, pemekaran wilayah merupakan salah satu bentuk otonomi daerah dan merupakan salah satu hal yang perlu diperhatikan karena dengan adanya pemekaran wilayah diharapkan dapat lebih memaksimalkan pemerataan pembangunan daerah dan pengembangan wilayah. Dengan semangat otonomi daerah itu pulalah muncul paradigma pemekaran wilayah yang dapat mempercepat pelaksanaan pembangunan, memudahkan pelayanan publik kepada masyarakat, serta percepatan kesejahteraan masyarakat. Di masa era reformasi sekarang, ruang bagi daerah untuk mengusulkan pembentukan Daerah Otonomi Baru dibuka lebar oleh kebijakan pemekaran daerah.

Dengan otonomi maka akan tercipta mekanisme, di mana daerah dapat mewujudkan sejumlah fungsi politik terhadap pemerintahan nasional, hubungan kekuasaan menjadi lebih adil sehingga, dengan demikian, daerah akan memiliki kepercayaan dan akhirnya akan terintegrasi ke dalam pemerintah nasional. Dengan otonomi, maka proses demokrasi dapat dijalankan yang juga akan menopang terwujudnya demokrasi dalam pemerintahan, dan pada akhirnya pembangunan daerah akan dipercepat.

Pemekaran wilayah (propinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa) merupakan dinamika kemauan politik masyarakat pada daerah-daerah yang memiliki cakupan luasan wilayah administratif cukup luas. Ditetapkannya UU No. 32 Tahun 2004 dan PP No. 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah, pemerintah telah memberikan ruang bagi daerah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk melakukan pemekaran wilayah dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata pada setiap tingkatan. Berdasarkan ketentuan tersebut, pemekaran daerah dapat berupa penggabungan dari beberapa daerah atau bagian daerah yang berdekatan atau pemekaran dari satu daerah menjadi lebih dari satu daerah. Sedangkan secara substansi, pemekaran daerah bertujuan untuk meningkatkan pelayanan pemerintah pada masyarakat dalam rangka percepatan pembangunan ekonomi daerah, peningkatan keamanan dan ketertiban untuk mewujudkan keserasian pembangunan antar pusat dan daerah. Selain itu diatas, pemekaran daerah dapat dijadikan sebagai sarana pendidikan politik di tingkat lokal untuk sesuai potensi dan cita-cita daerah.

Gagasan pemekaran wilayah dan pembentukan Daerah Otonom Baru memiliki dasar hukum yang cukup kuat. Secara yuridis landasan yang memuat persoalan pembentukan daerah terdapat dalam pasal 18 UUD 1945 yang intinya, bahwa membagi daerah Indonesia atas daerah besar (provinsi) dan daerah provinsi akan dibagi dalam daerah yang lebih kecil. Selanjutnya dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang memberi peluang pembentukan daerah dalam suatu NKRI, yaitu daerah yang dibentuk berdasarkan pertimbangan kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah dan pertimbangan lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah.

Dari sisi pemerintah pusat, proses pembahasan pemekaran wilayah yang datang dari berbagai daerah melalui dua tahapan besar yaitu proses teknokratis (kajian kelayakan teknis dan administratif), serta proses politik karena selain

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

harus memenuhi persyaratan teknokratis yang telah diatur dalam UU dan Peraturan Pemerintah, proposal pemekaran harus didukung secara politis oleh DPR. (Andik Wahyun Muqoyyidin, 2013 : 288-292)

Dalam rangka melaksanakan otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa pemberian otonomi kepada daerah kota/kabupaten didasarkan atas asas desentralisasi dalam wujud otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab. Pemberian kewenangan atas dasar asas desentralisasi tersebut, menyebabkan semua bidang pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan suatu otonomi pada dasarnya menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah kota dan kabupaten sepenuhnya, baik yang menyangkut penentuan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi. (Muhammad Mujtaba Habibi, 2015 : 117)

Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Secara umum, pemekaran wilayah merupakan suatu proses pembagian wilayah menjadi lebih dari satu wilayah, dengan tujuan meningkatkan pelayanan dan mempercepat pembangunan. Salah satu aspek yang sangat penting dari pelaksanaan otonomi daerah saat ini adalah terkait dengan pemekaran dan penggabungan wilayah yang bertujuan untuk memperkuat hubungan antara pemerintah daerah dan masyarakat lokal dalam rangka pertumbuhan kehidupan demokrasi. Dengan interaksi yang lebih intensif antara masyarakat dan

pemerintah daerah baru, maka masyarakat sipil akan memperoleh hak-hak dan kewajiban-kewajibannya secara lebih baik sebagai warga negara.
(<http://repository.usu.ac.id>)

2.1.5. Tujuan Pemekaran

Tujuan dari otonomi daerah menurut UU No. 5 tahun 1975 adalah untuk memungkinkan daerah yang bersangkutan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan. Meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan daerah terutama dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat serta untuk meningkatkan pembinaan kestabilan politik dan kesatuan bangsa. UU No. 22 tahun 1999 tentang otonomi daerah butir (b) dan (c) dapat memberikan gambaran tentang tujuan Otonomi Daerah. Isi kedua butir menimbang ini adalah seperti berikut:

1. Bahwa dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah, dipandang perlu untuk lebih menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman Daerah.
2. Bahwa dalam menghadapi perkembangan keadaan, baik di dalam maupun di luar negeri, serta tantangan persaingan global, dipandang perlu menyelenggarakan Otonomi Daerah dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional, yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, dan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

pemanfaatan sumber daya nasional, serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta potensi dan keanekaragaman Daerah, yang dilaksanakan dalam kerangka NKRI.

Tujuan pemekaran daerah menurut Undang-undang No. 32 tahun 2004 adalah otonomi daerah diarahkan untuk memacu pemerataan pembangunan dan hasil- hasilnya, meningkatkan kesejahteraan rakyat, menggalakkan prakarsa dan peran serta aktif masyarakat secara nyata, dinamis, dan bertanggung jawab sehingga memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, mengurangi beban pemerintah pusat dan campur tangan di daerah yang akan memberikan peluang untuk koordinasi tingkat lokal.

Sedangkan ketentuan pemekaran wilayah juga ditentukan dalam pasal 6 ayat 2 UU No. 22 tahun 1999 yaitu daerah dapat dimekarkan lebih dari satu, dimana pemekaran berasal dari kata mekar yang berarti berkembang dan “an” menjadi pemekaran. Jadi pemekaran daerah adalah pemecahan suatu daerah untuk dikembangkan menjadi dua atau lebih untuk melaksanakan pemerintah daerah sesuai dengan kriteria perundang-undangan dan peraturan. Tujuan dari pemekaran wilayah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan asli daerah. Pemerintahan daerah menurut UU No. 34 tahun 2004 pada pasal 2 ayat 2 adalah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan pembantu.

Hak Cipta Ditindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan menurut Simalungun dalam Elvawati (2013) ada tiga tujuan otonomi yaitu (1). Untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, (2). Mempunyai hak untuk menggali sumber dana yang ada didaerah sendiri, (3). Meningkatkan sumber daya manusia.

Selain itu tujuan dari otonomi daerah adalah : Menciptakan kemandirian, Meningkatkan pelayanan publik. Mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Otonomi daerah muncul merupakan akibat adanya perubahan yaitu adanya reformasi sehingga dikeluarkannya UU No. 22 tahun 1999 yang mengakibatkan munculnya pemekaran-pemekaran. UU No. 22 tahun 1999 kemudian direvisi menjadi UU No. 34 tahun 2004 yang bertujuan untuk menyempurnakan UU No. 22 tahun 1999.

Sedangkan menurut Sudantoko (2003) dalam Elvawati (2013) alasan daerah untuk melakukan pemekaran adalah:

1. Akibat kesenjangan pendapat antara daerah-daerah besar;
2. Akibat kesenjangan investasi;
3. Pendapatan daerah dikuasai pusat;
4. Pemusatan industri akibat kebijaksanaan investasi dan birokrasi serta infrastruktur yang terpusat;
5. Melebar kesenjangan regional akibat adanya ketimpangan alokasi kredit.

Adapun tujuan dari pemekaran daerah adalah :

1. Untuk meningkatkan pendapatan asli daerah;
2. Mempunyai hak untuk menggali sumber dana yang ada didaerah sendiri;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Meningkatkan sumber daya manusia;
4. Menciptakan kemandirian;
5. Meningkatkan pelayanan publik;
6. Mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Akibat keluarnya UU otonomi daerah, banyak daerah yang menginginkan pemisahan dengan daerah induknya dengan berbagai alasan : (1). Akibat kesenjangan pendapat antara daerah-daerah besar, (2) Akibat kesenjangan investasi, (3) Pendapatan daerah dikuasai pusat, (4) Pemusatan industri akibat kebijaksanaan investasi dan birokrasi serta infrastruktur yang terpusat, (5). Melebar kesenjangan regional akibat adanya ketimpangan alokasi kredit, (6). Diabaikan oleh pusat, (7). Mempermudah urusan masyarakat dengan pemerintah, (8). Partisipasi masyarakat, (9). Meningkatkan kesejahteraan rakyat, (10). Luasnya wilayah, jumlah penduduk, dan sarana prasarana lengkap. (Elvawati, 2013 : 19-21)

Menurut Murtir Jaddawi (2009) Beberapa faktor penyebab terjadinya pemekaran di antaranya adalah (a) faktor-faktor pendorong seperti (1) faktor kesejarahan, (2) faktor tidak meratanya pembangunan, (3) rentang kendali pelayanan publik yang jauh, dan (4) tidak terakomodasinya representasi politik, dan (b) faktor penarik, yaitu kucuran dana (fiskal) dari pusat. Sedangkan faktor yang memfasilitasi munculnya pemekaran di antaranya adalah: (1) Proses persiapan untuk mekar; (2) *Political crafting* oleh paraelite; (3) Kondisi perpolitikan nasional; dan (4) faktor tuntutan keamanan daerah perbatasan (Murtir Jeddawi, 2009: 116)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.1.6. Menilai Kriteria Persiapan Untuk Pemekaran

Haw widjaja mengungkapkan tolak ukur atau indikator untuk mengetahui kemampuan dalam berotonomi untuk daerah yaitu:

1. Variabel pokok yang terdiri dari :
 - a) Kemampuan PAD / keuangan;
 - b) Kemampuan aparatur;
 - c) Kemampuan partisipasi masyarakat;
 - d) Kemampuan ekonomi;
 - e) Kemampuan demografi;
 - f) Kemampuan organisasi dan administrasi.
2. Variabel penunjang yang terdiri dari:
 - a) Faktor geografi;
 - b) Faktor sosial budaya.
3. Variabel khusus yang terdiri dari:
 - a) Sosial politik;
 - b) Hankam;
 - c) Penghayatan keagamaan (Haw Widjaja, 2003: 39).

Untuk itu juga ada beberapa aspek yang harus dipersiapkan adalah sumber daya manusia, sumber daya keuangan, sarana dan prasarana, serta organisasi dan manajemennya.

Kesiapan sumber daya manusia lebih tertuju kepada pentingnya kualitas manusia pelaksana (aparatur daerah) dari pada persoalan kuantitasnya. Mengingat

Hak Cipta Ditanggung Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

aparatur daerah memegang peran sentral sebagai perencana, pelaksana dan sekaligus pengawas pelaksana kegiatan pemerintah, pembangunan, dan pembinaan masyarakat, maka dimasa sekarang persoalan pembinaan dan pengembangan aparatur daerah merupakan kebutuhan yang mendesak yang harus dilakukan. (M. Busrizalti: 2013:150). Prinsip-prinsip pelaksanaan otonomi daerah yang dijadikan penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah sebagai berikut :

1. Memperhatikan aspek demokrasi, keadilan pemerataan, serta potensi dan keanekaragaman budaya;
2. Didasarkan otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab;
3. Otonomi daerah yang luas dan utuh diletakkan pada kabupaten dan kota, pada provinsi merupakan otonomi terbatas;
4. Harus sesuai dengan konstitusi negara;
5. Harus lebih meningkatkan kemandirian daerah otonom;
6. Harus meningkatkan peranan dan fungsi badan legislatif daerah (fungsi penganggaran, pengawasan, dan legislasi);
7. Pelaksanaan asas dekonstrasi diletakkan pada daerah provinsi untuk melaksanakan kewenangan pemerintah tertentu yang dilimpahkan kepada gubernur;

Pelaksanaan asas tugas pembentukan dimungkinkan, tidak hanya dari pemerintah kepada daerah, tetapi juga dari pemerintah dan daerah kepada desa. (Nanang Nugraha, 2013:4)

2.1.7 Tahapan Persiapan Pemekaran

Pemekaran wilayah (propinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa)

merupakan dinamika kemauan politik masyarakat pada daerah-daerah yang memiliki cakupan luasan wilayah administratif cukup luas. Ditetapkannya UU No. 32 Tahun 2004 dan PP No. 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah, pemerintah telah memberikan ruang bagi daerah untuk melakukan pemekaran wilayah dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata pada setiap tingkatan. Berdasarkan ketentuan tersebut, pemekaran daerah dapat berupa penggabungan dari beberapa daerah atau bagian daerah yang berdekatan atau pemekaran dari satu daerah menjadi lebih dari satu daerah. Sedangkan secara substansi, pemekaran daerah bertujuan untuk meningkatkan pelayanan pemerintah pada masyarakat dalam rangka percepatan pembangunan ekonomi daerah, peningkatan keamanan dan ketertiban untuk mewujudkan keserasian pembangunan antar pusat dan daerah. Selain itu diatas, pemekaran daerah dapat dijadikan sebagai sarana pendidikan politik di tingkat lokal untuk sesuai potensi dan cita-cita daerah.

Gagasan pemekaran wilayah dan pembentukan Daerah Otonom Baru memiliki dasar hukum yang cukup kuat. Secara yuridis landasan yang memuat persoalan pembentukan daerah terdapat dalam pasal 18 UUD 1945 yang intinya, bahwa membagi daerah Indonesia atas daerah besar (provinsi) dan daerah provinsi akan dibagi dalam daerah yang lebih kecil. Selanjutnya dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang memberi peluang pembentukan daerah dalam suatu NKRI, yaitu daerah yang dibentuk berdasarkan pertimbangan kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

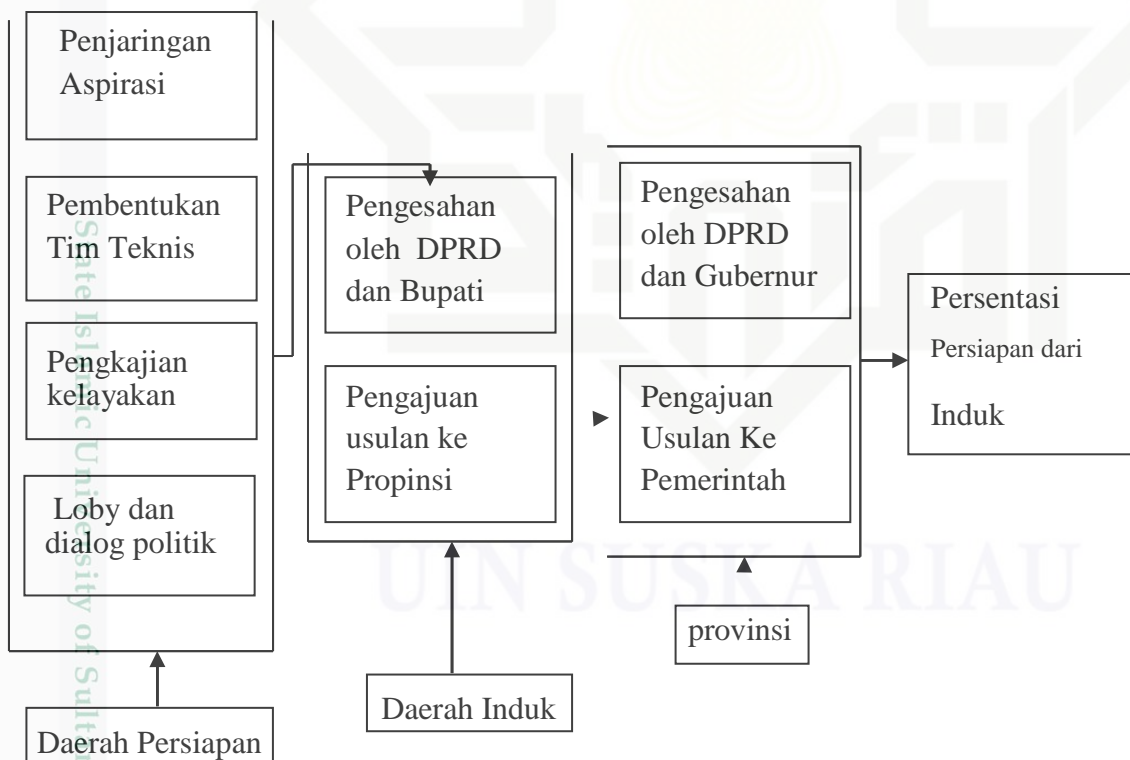
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari sisi pemerintah pusat, proses pembahasan pemekaran wilayah yang datang dari berbagai daerah melalui dua tahapan besar yaitu proses teknokratis (kajian kelayakan teknis dan administratif), serta proses politik karena selain harus memenuhi persyaratan teknokratis yang telah diatur dalam UU dan Peraturan Pemerintah, proposal pemekaran harus didukung secara politis oleh DPR. Berikut akan digambarkan tentang skema proses pengusulan pemekaran di tingkat daerah.

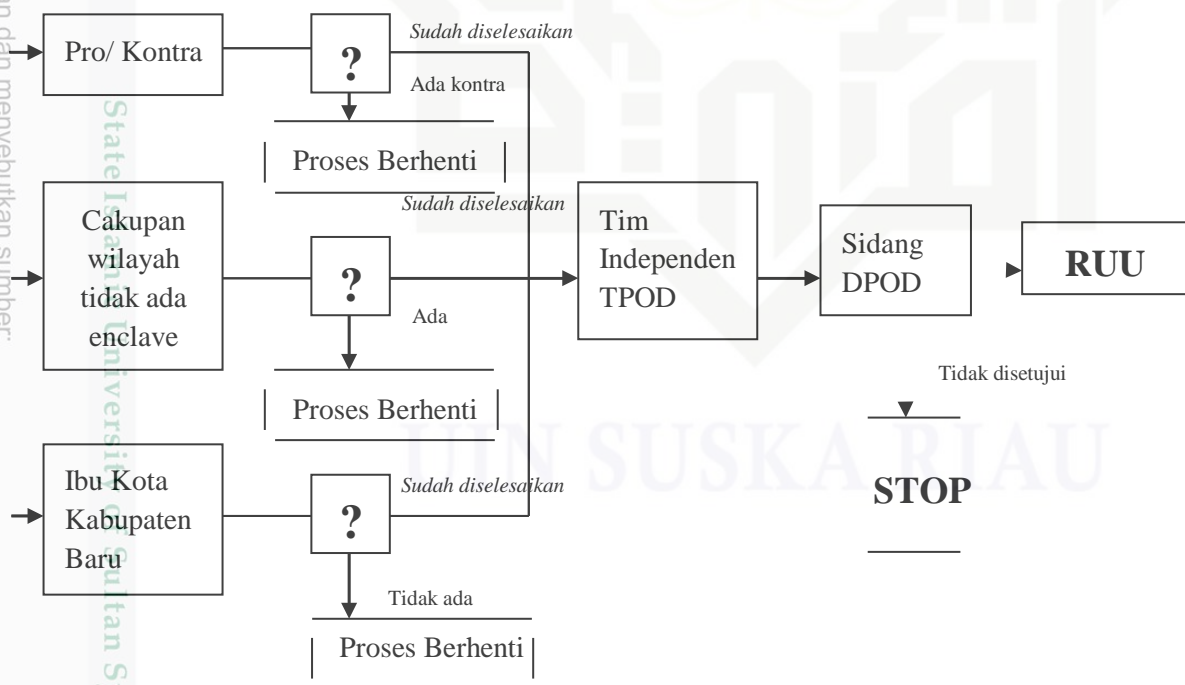
Gambar 2.1.



Dari gambar diatas dijelaskan bahwa persiapan dalam pemekaran wilayah dimulai dari wilayah yang mengusulkan. Usulan-usulan tersebut berbentuk proposal yang sudah memiliki pertimbangan-pertimbangan di dalamnya dan kajian-kajian ilmiah, sehingga ketika proposal rencana pemekaran wilayah tersebut diajukan ke DPRD kabupaten/ kota dan kemudian ke propinsi, dapat dipertanggungjawabkan dengan berlandaskan peraturan-peraturan yang berlaku.

Dalam rangka memahami proses kebijakan pemekaran, perlu digambarkan bagaimana pemerintah nasional meloloskan usulan pemekaran daerah otonom. Prosedur pembahasan ditingkat pusat untuk “meluluskan atau tidak meluluskan” proposal pembentukan daerah otonom baru secara teknokratis dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.2.
Tahapan Pembentukan Kabupaten/ Kota



1. Diarahkan mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarahkan mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Gambar diatas menjelaskan tentang tahapan dan prosedur pembentukan daerah kabupaten/kota menurut PP No. 78/2007 tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah sebagai pengganti PP No. 129/2000, pada Pasal 16 dimana ada beberapa prosedur yang harus dilalui oleh daerah Kabupaten/Kota yang akan dimekarkan, yaitu:

1. Aspirasi sebagian besar masyarakat setempat dalam bentuk Keputusan BPD untuk Desa dan Forum Komunikasi Kelurahan atau nama lain untuk Kelurahan di wilayah yang menjadi calon cakupan wilayah Kabupaten/Kota yang akan dimekarkan.
2. DPRD Kabupaten/Kota dapat memutuskan untuk menyetujui atau menolak aspirasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam bentuk Keputusan DPRD berdasarkan aspirasi sebagian besar masyarakat setempat yang diwakili oleh BPD untuk desa atau nama lain dan Forum Komunikasi Kelurahan untuk kelurahan atau nama lain;
3. Bupati/Walikota memutuskan untuk menyetujui atau menolak aspirasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam bentuk keputusan Bupati/ Walikota berdasarkan hasil kajian daerah;
4. Bupati/Walikota mengusulkan pembentukan Kabupaten/Kota kepada

Gubernur untuk mendapatkan persetujuan dengan melampirkan:

- a. Dokumen aspirasi masyarakat di calon Kabupaten/Kota;
- b. Hasil kajian daerah;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Peta wilayah calon Kabupaten/Kota; dan
5. Keputusan DPRD Kabupaten/Kota dan keputusan Gubernur memutuskan untuk menyetujui atau menolak usulan pembentukan Kabupaten/Kota berdasarkan evaluasi terhadap kajian daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf c;
6. Gubernur menyampaikan usulan pembentukan calon Kabupaten/Kota kepada DPRD Propinsi;
7. DPRD Propinsi memutuskan untuk menyetujui atau menolak usulan pembentukan Kabupaten/Kota; dan
8. Dalam hal Gubernur menyetujui usulan pembentukan Kabupaten/Kota, Gubernur mengusulkan pembentukan Kabupaten/Kota kepada Presiden melalui Menteri dengan melampirkan:
 - d. Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf a dan huruf b.
 - a. Dokumen aspirasi masyarakat di calon Kabupaten/Kota;
 - b. Hasil kajian daerah;
 - c. Peta wilayah calon Kabupaten/Kota;
 - d. Keputusan DPRD Kabupaten/ Kota dan keputusan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf a dan huruf b ; dan
 - e. Keputusan DPRD Propinsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf c.
 - f. Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam pasal 5

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ayat (1) huruf d. (Andik Wahyun Muqoyyin, 2013: 291-295)

a. Peran Pihak-pihak di Daerah dalam Pemekaran Wilayah

1. Daerah Persiapan

Dalam melakukan pemekaran wilayah, maka pembentukan daerah persiapan menjadi penting dalam upaya penataan daerah. Seiring dengan hal tersebut, maka peran daerah persiapan tidak saja mencakup persoalan administratif semata, tetapi juga perlu mencakup beberapa aspek lain, antara lain:

- a. Mempersiapkan persyaratan fisik yang berkaitan dengan penataan ruang maupun batas wilayah. Disamping itu juga terumuskannya dokumen rencana tata ruang lokasi calon Ibukota daerah otonom baru maupun calon Ibukota Daerah Induk.
- b. Mempersiapkan persyaratan kelembagaan dan organisasi yang berkaitan dengan kebutuhan kantor, identifikasi aset, fungsi staf, struktur organisasi, maupun proses perencanaan dan penganggaran. Hal ini penting dilakukan dalam masa persiapan agar proses pemekaran wilayah menjadi kebutuhan bersama antara Daerah Induk dengan Calon Daerah Otonomi Baru. Dengan demikian konflik tentang pengalihan aset-pun sudah dapat dihindari sejak awal.
- c. Mempersiapkan persyaratan teknis administratif yang berkaitan dengan kerjasama dengan Daerah Induk dan pihak ketiga yang akan melakukan pengkajian terhadap kelayakan pembentukan daerah otonomi baru atau pemekaran wilayah. Berkaitan dengan daerah persiapan ini, maka perlu ada persyaratan-persyaratan khusus, seperti daerah yang sudah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memenuhi standar kelayakan teknis dan administratif bagi terbentuknya daerah otonomi baru yang ditetapkan melalui rekomendasi dari DPOD atau Permendagri yang selanjutnya mempersiapkan diri selama minimal 2 (dua) tahun sebagai masa persiapan sebelum disahkan sebagai daerah otonom baru yang ditetapkan dengan Undang-undang.

2. Peran Masyarakat

Suara dan peran masyarakat menjadi syarat utama untuk keberlanjutan suatu proses pemekaran wilayah. Hal ini sesuai dengan hakekat pemekaran wilayah yang berorientasi pada peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, peran masyarakat dituangkan secara jelas dalam peraturan perundang-undangan dalam bentuk referendum untuk menentukan pilihan perlu atau tidaknya dilakukan pemekaran wilayah.

Dalam kaitan dengan hal ini, lembaga-lembaga atau organisasi masyarakat juga harus berperan dalam memberdayakan masyarakat supaya ada pengertian yang baik tentang keuntungan dan kelemahan pemekaran wilayah maupun pentingnya pelaksanaan referendum. Dengan demikian, dalam tahap awal atau masa persiapan, kegiatan yang harus dilaksanakan pertama kali adalah melakukan penjaringan aspirasi masyarakat. Meskipun terdapat berbagai metode penjaringan aspirasi seperti melalui kuesioner, seminar atau lokakarya, namun dalam hal pemekaran wilayah nampaknya referendum merupakan pendekatan yang paling tepat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Peran Daerah Induk

Adapun peran Bupati sebagai kepala di daerah induk, yaitu:

- a. Memberikan rekomendasi persetujuan dan mendukung rencana pemekaran wilayah berdasarkan aspirasi masyarakat melalui referendum.
- b. Melakukan hearing dengan dengan Daerah Persiapan
- c. Memberikan persetujuan dan mengajukan permohonan kepada Gubernur dan Mendagri untuk dapat mengabulkan rencana pemekaran wilayah
- d. Menetapkan *Liason Officer* sebagai wakil Daerah Induk untuk melakukan komunikasi intensif dengan berbagai pihak yang terkait baik di tingkat daerah, propinsi, maupun pemerintah pusat. Memfasilitasi kunjungan tim observasi dari pemerintah pusat dan DPR RI.
- e. Mengalokasikan anggaran bagi kegiatan pemekaran wilayah.

Peran DPRD dalam pemekaran wilayah ini yaitu:

- a. Memberikan rekomendasi dan dukungan politik terhadap rencana pemekaran wilayah.
- b. Membentuk Pansus (Panitia Khusus) yang akan melakukan pembahasan tentang rencana pemekaran wilayah
- c. Mengeluarkan surat keputusan persetujuan dan dukungan terhadap pemekaran wilayah, serta keputusan tentang calon Ibu Kota dan dukungan pembiayaan dalam masa persiapan sampai pada proses

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembentukan DPRD dan pemilihan Kepala Daerah.

- d. Memberikan rekomendasi sekaligus permohonan kepada DPRD Propinsi untuk dapat memberikan persetujuan terhadap rencana pemekaran wilayah.

4. Peran Propinsi

Peran propinsi dalam pemekaran wilayah yaitu:

- a. Memberikan rekomendasi dan persetujuan tentang pemekaran wilayah, serta menindak lanjutinya dengan mengajukan permohonan persetujuan dari Pemerintah Pusat.
- b. Memfasilitasi serah terima asset antara daerah induk dengan daerah baru.

([http:// repository. usu. ac. id](http://repository.usu.ac.id))

2.2 Pandangan Islam Terhadap Pemekaran

Terkait dengan ayat-ayat yang berhubungan dengan pemekaran yaitu sebagai berikut:

ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِّعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ
وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٥٣﴾

Artinya: Yang demikian itu karena sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu nikmat yang telah diberikan-Nya kepada suatu kaum, hingga kaum itu mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Sungguh, Allah maha mendengar, maha mengetahui. (Qs. Al-Anfaal : 53)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam hal ini Allah tidak akan mengubah sesuatu nikmat yang telah dianugerahkan-Nya kepada suatu kaum sehingga kaum itu mengubah apa yang ada pada diri mereka, sebab Allah tidak akan mengubah nikmat yang telah dikaruniakan pada suatu kaum berupa perdamaian, kesejahteraan hidup dan kesehatan selama mereka tidak mengubah nikmat itu sendiri dengan melakukan perbuatan yang menyebabkan hilangnya nikmat itu, Allah maha mendengar dan maha mengetahui perbuatan mereka.

وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَاقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تَوْبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ

Artinya: “Dan kepada Tsamud (Kami utus) saudara mereka shaleh. Shaleh berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya [maksudnya: manusia dijadikan penghuni dunia untuk menguasai dan memakmurkan dunia], Karena itu mohonlah ampunan-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya, sesungguhnya Tuhanku amat dekat (rahmat-Nya) lagi memperkenankan (doa hamba-Nya)".(QS. Hud : 61).

Maksud dari ayat ini, Tugas manusia dimuka bumi ini tidak lain adalah untuk memakmurkan bumi, mensejahterakan umat manusia sendiri lebih-lebih lingkungan-nya sebagai tempat tinggal dan menetap. manusia yang dipercaya oleh Allah sebagai khalifah itu bertugas memakmurkan atau membangun bumi ini

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sesuai dengan konsep yang ditetapkan oleh yang menugaskan (Allah). Maksud dari *manusia sebagai pemakmur bumi* adalah; karena manusia itu diciptakan dari tanah yang diambil dari bumi, maka sepatutnya manusia yang bahan utamanya adalah tanah untuk menjaga dan memakmurkannya, sebagai tanda penghargaan atas asal-usul penciptaan mereka. Dengan kekuasaan yang diberikan kepadanya, manusia harus mampu menjaga amanah yang diberikan Allah kepada mereka dalam hal-hal yang menyebabkan bumi itu tetap terjaga dan makmur. Sebaliknya, jika manusia itu dengan kekuasaannya merusak dan menyalah gunakan kekuasaan yang diamanahkan kepadanya, maka secara tidak langsung manusia itu telah menghina asal-usul dari mana mereka diciptakan (tanah). Allah SWT memperhatikan eksistensi manusia di muka bumi, setelah memperoleh cukup pengetahuan maka Allah SWT menempatkan manusia sebagai eksistensi yang kreatif, sebagaimana termaktub dalam surat Hud ayat 61 “*Dan Dia yang menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menugaskan kamu untuk memakmurkan.*”

2.3 Penelitian Terdahulu

Ade Ahmad Faruk Syahputra (2011) dampak pemekaran wilayah Kabupaten Serdang Bedagai terhadap kesejahteraan masyarakat. Masalah dalam penelitian ini tingkat kesejahteraan masyarakat sebelum dan setelah pemekaran yang telah terjadi di wilayah kabupaten serdang bedagai terjadi penurunan yang dapat dilihat melalui indeks pembangunan manusia, dimana pada tahun 2007 IPM kabupaten serdang bedagai sekitar 71,9, tahun 2008 berkisar 72,99 dan pada tahun 2009 menjadi 72,9. Dari segi permasalahan dan lokasi antara peneliti dengan

penelitian sebelumnya berbeda. Sedangkan Persamaannya adalah dalam penelitian ini fokus penelitian sama-sama meneliti tentang pemekaran.

Fitri Anggraini (2016) Tentang Implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan (Studi Kelayakan Pemekaran Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis). Masalah dalam penelitian ini kecamatan mandau yang sudah lama diperbincangkan untuk dimekarkan namun sampai saat ini belum juga mekar-mekar. Lambatnya proses pemekaran kecamatan Mandau disebabkan oleh beberapa hambatan, diantaranya: kurangnya cakupan wilayah diawal pengajuan pemekaran, lambatnya tanggapan terhadap aspirasi masyarakat, adanya faktor politik, dan adanya perubahan peraturan perundang-undangan. Dari segi permasalahan dan lokasi antara peneliti dengan penelitian sebelumnya berbeda. Sedangkan Persamaannya adalah dalam penelitian ini fokus penelitian sama-sama meneliti tentang pemekaran.

Ratty puspitasari (2014) tentang Faktor – faktor yang mempengaruhi pembentukan daerah baru (Studi Kelayakan Secara Administratif Kabupaten Indragiri Selatan). Masalah dalam penelitian ini Persyaratan administratif calon Kabupaten Insel menemukan permasalahan pada perbedaan nama dan cakupan wilayah calon Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum pada Keputusan Bupati Indragiri Hilir dan DPRD Indragiri Hilir. Dari segi permasalahan antara peneliti dengan penelitian sebelumnya berbeda namun sama lokasinya. Peneliti sebelumnya membahas mengenai persyaratan secara administratif, namun penulis meneliti mengenai persiapan pemekaran wilayah Kabupaten Indragiri Selatan sebagai daerah otonom baru.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

2.4 Defenisi Konsep

Agar memudahkan dalam menganalisa data guna mendapatkan pengertian yang jelas dan permasalahan tidak kabur, maka diperlukan defenisi konsep. Konsep adalah suatu hal umum yang menjelaskan atau menyusun suatu peristiwa, objek, situasi, ide, atau akal pikiran dengan tujuan untuk memudahkan komunikasi antar manusia dan memungkinkan manusia untuk berpikir lebih baik. Menurut (M. Idrus, 2009:17) konsep adalah istilah dan defenisi yang digunakan untuk menggambarkan gejala secara abstrak, contohnya seperti kejadian, keadaan, dan kelompok. Adapun beberapa definisi konsep yang digunakan dalam penulisan ini diantaranya yaitu:

- 1) Analisis adalah suatu rangkaian kegiatan untuk menelaah dengan cara menggunakan metode dan argumen berdasarkan data, fakta, dan informasi.
- 2) Persiapan adalah suatu kegiatan yang akan dipersiapkan sebelum melakukan sebuah kegiatan.
- 3) Pemekaran adalah suatu bagian yang utuh atau suatu kesatuan yang dibagi atau dipisahkan menjadi beberapa bagian yang berdiri sendiri.
- 4) Wilayah adalah tempat dimana menetapnya rakyat dan merupakan tempat penyelenggaraan pemerintahan negara.

Dalam hal ini pemekaran dapat berupa pembentukan daerah yaitu pemberian status pada wilayah tertentu sebagai daerah provinsi, atau daerah kabupaten / kota.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.5 Konsep Operasional

Konsep operasional merupakan unsur penelitian yang memberikan bagaimana cara mengukur suatu variabel, sehingga dengan pengukuran ini dapat diketahui indikator sebagai pendukung untuk dianalisa dari variable tersebut. Dalam Undang-Undang tentang pemerintahan Daerah Nomor 32 tahun 2004 maka untuk pemekaran Kabupaten Indragiri Selatan yang menjadi acuan pada indikator penelitian ini penulis menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, Dan Penggabungan Daerah, yaitu sebagai berikut :

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 2.1

Konsep Operasional Penilaian Pemekaran Wilayah Kabupaten Indragiri Selatan Sebagai Daerah Otonom Baru.

Reverensi	Indikator	Sub Indikator
Pemekaran Kabupaten PP. Nomor. 78 tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, Dan Penggabungan Daerah.	1. Syarat Administratif	a. Batas usia penyelenggaraan pemerintahan; b. Keputusan DPRD Kabupaten/Kota induk; c. Keputusan Bupati/Wali Kota induk; d. Keputusan DPRD Provinsi; e. Keputusan Gubernur; f. Rekomendasi Menteri.
	2. Syarat teknis	a. Kemampuan Ekonomi; b. Potensi Daerah; c. Sosial Budaya; d. Sosial Politik; e. Kependudukan; f. Luas Daerah; g. Pertahanan; h. Keamanan; i. Kemampuan Keuangan; j. Tingkat Kesejahteraan Masyarakat; k. Rentang Kendali Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
	3. Syarat fisik kewilayahan	a. Cakupan wilayah; b. Lokasi calon Ibu kota; c. Sarana dan Prasarana Pemerintahan.

Sumber : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2007

Tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, Dan Penggabungan Daerah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.6 Kerangka Pemikiran

Berikut gambar dari variabel penelitian Persiapan Pemekaran Wilayah Kabupaten Indragiri Selatan Sebagai Daerah Otonom Baru.

Gambar 2.3
Kerangka Pemikiran Penelitian

